



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Tahun 2025-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 25);
13. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di Kabupaten untuk penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan berdasarkan kewenangannya masing-masing.
10. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi di Kabupaten Muara Enim yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas dan berdaya saing.

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Muara Enim.

Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya.
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah.

- c. meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintah dan juga ditataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing; dan
- d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan kepemudaan dalam periode 2025 - 2026.

BAB II
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Pasal 4

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten meliputi :

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;

- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *human immunodeficiency virus acquired immunodeficiency syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku

- kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
 - g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
 - h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2025 - 2026

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan melalui RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025 - 2026.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - c. indikator;
 - d. *baseline*;
 - e. target; dan
 - f. perangkat daerah/lembaga pelaksana.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 – 2026.
- (4) Matriks RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor RAD Pelayanan Kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tim yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Unsur keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. Instansi Vertikal; dan
 - c. Akademisi.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tim pengarah; dan
 - b. tim pelaksana.
- (5) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mempunyai tugas memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (6) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
 - b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan dari tim pengarah; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur melalui ketua tim pengarah.

- (7) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dapat dibentuk tim kelompok kerja.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b, dapat dibentuk tim sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kepemudaan.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan fungsi tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

BAB V

HUBUNGAN KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja internal Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing perangkat daerah di Kabupaten guna penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Hubungan kerja antara Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Provinsi dan Tim Koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Kabupaten/Kota bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 20 MEI 2025

BUPATI MUARA ENIM,

dto.

EDISON

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 20 MEI 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2025 NOMOR

Dimana Pendidikan dan Pelatihan 1. Perantara Pemuda mendapatkan Pelatihan bersertifikat, 2. Perantara Pemuda yang memiliki (sudah SMA/ sederajat atau lebih tinggi); dan 3. Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK.		Perantara pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat												
Bentuk Koordinasi Pendidikan formal dan nonformal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan penguasaan karakter dan kompetensi individu pemuda, termasuk bagi pemuda yang berada di luar sekolah. Penguasaan karakter dan kompetensi individu ini diperlukan sebagai modal dasar bagi pemuda agar memiliki ketahanan dari perilaku berisiko, untuk berpartisipasi di pasar kerja dan berprestasi aktif dalam pembangunan. Disamping itu, pendidikan dan pelatihan juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemuda untuk dapat membina keluarga dan generasi penerus bermutu yang unggul berkeadilan secara berkualitas. Karenanya, di dalam domain pendidikan dan pelatihan, pemuda didorong untuk mengoptimalkan pendidikan formal dan mengikuti pelatihan (pendidikan nonformal).		Perantara pemuda berusia 16-30 tahun yang menggunakan ponsel, email komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir												
Kerangka Strategis Lintas Rektor	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DEFINISI/ AKTIVITAS	Baseline	Target					Sasaran Output	Pengaruh Daerah Pelaksana (OPD)			
					2024	2025	2026	2027	2028			2029		
* (KABUPATEN / KOTA) *	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
	1.01.02.2.02		Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama											
	sudah dilaksanakan	1.01.02.2.02.0050		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	220	320	230	250				DRABD
		1.01.02.2.02.0062		Pengadaan Peralaksanaan Program Diklat		Jumlah pelaksanaan Program Diklat yang Tersedia	14618	14618	14623	14628				PAKET
		1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Informal										
		1.01.02.2.04.0026		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	41	41	45	50				DRABD
		1.01.02.2.04.0028		Sosialisasi dan Adopsi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan adopsi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	1	1				DOKUMEN
	1.01.03		PROGRAM PERDEMBANGAR KURIKULUM									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	1.01.03.2.02		Penyusunan Kurikulum Murni Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal											
	1.01.03.2.02.0003		Penyusunan Buku Teks Pelajaran Murni Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		Jumlah buku-buku pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang terbitkan	150	150	150	150					DOKUMEN
1.05.02		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCASA								DINAS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1.05.02.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Binaan Bencana Kabupaten/Kota												
1.05.02.2.01.0007		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (SKIE) Binaan Bencana Kabupaten/Kota (Perencanaan Ancaman Bencana)												
1.05.02.2.02		Pelayanan Pengurangan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
1.05.02.2.02.0019		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam												
1.05.02.2.02.0028		Pelatihan Peringatan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota												
2.11.06		PROGRAM PERINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYIARAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.06.2.01		Penyempurnaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyiaran Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2.11.06.2.01.0008		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas/lembaga masyarakat												
03.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
3.12.02.2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk												
3.12.02.2.01.0001		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Berinc. Administrasi Kependudukan		Pendataan dan pelaksanaan Jemput bola Dokumen Kependudukan penduduk Non Permanen dan Berinc. Administrasi Kependudukan (Penduduk yang mengalami perubahan status memperoleh Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas/instansi, baik, bencana alam, dsb)	2	2	2	2				DOKUMEN		
3.12.02.2.01.0004		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Pembinaan Dokumen Kependudukan	2	2	2	2				DOKUMEN		
3.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
3.12.03.2.02		Penerbitan/urusan Perakitan Sipil												

1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02		Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama									
1.01.02.2.02.0038		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama									
1.01.02.2.02.0048		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
1.01.02.2.02.0050		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
1.01.02.2.02.0052		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
1.01.02.2.02.0058		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
1.01.02.2.02.0062		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik									
1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keasetaraan									
1.01.02.2.04.0010		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Keasetaraan									
1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keasetaraan									
1.01.02.2.04.0024		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
1.01.02.2.04.0026		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
1.01.02.2.04.0028		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
1.01.02.2.04.0035		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik									
1.01.02.2.04.0042		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKI untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
1.01.02.2.04.0059		Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat									

<p>Domain Kesehatan</p> <p>1. Angka kesakitan Pemuda;</p> <p>2. Persentase pemuda yang merokok;</p> <p>3. Persentase pemuda yang berolahraga; dan</p> <p>4. Persentase remaja perempuan yang sedang hamil.</p> <p>Bentuk Koordinasi</p> <p>Kesehatan pemuda menggambarkan pemuda yang sehat, baik secara jiwa maupun raga, serta menghindari perilaku berisiko yang dapat berpengaruh buruk bagi kesehatannya, agar pemuda dapat meningkatkan kapasitas dirinya dan berkontribusi secara maksimal terhadap pembangunan</p>	<p>Proporsi pemuda berusia 16-30</p> <p>Persentase pemuda usia 16-30</p> <p>Persentase pemuda yang berolahraga olah raga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda</p> <p>Persentase remaja perempuan usia 15-18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15-18 tahun yang telah/pernah kawin</p>
--	---

C. KEGIATAN MENOATASI DEKADENSI MORAL, PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN KEKERASAN, SERTA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Koordinator Strategis Lintas Sektor (KABUPATEN/ KOTA)	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Definisi/ Aktivitas	Baseline	Target					Satuan Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)
					2024	2025	2026	2027	2028		
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota									
	1.05.02.2.01.0006	1.05.02.2.01.0006	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum								
	1.05.02.2.01.0004	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	150	150	272	272			ORANO	
	1.05.02.2.01.0015	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan								
	1.05.02.2.02	Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati/Walikota									
	1.05.02.2.02.0010	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	3	5	6			LAPORAN	
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.01	1.06.05.2.01 Pemeliharaan anak-anak terlantar									
	1.06.05.2.01.0001	1.06.05.2.01.0001	Pengabdian anak-anak terlantar								

8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Merekrut organisasi pemuda kedalam Forum Kerukunan umat beragama dan melaksanakan sosialisasi	100	100	100	100							ORANG
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat												
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup												
2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat												
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN BERSANDIA	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Kabupaten/Kota												
2.16.02.2.01.0002	Monitoring opini dan aspirasi publik	Sosialisasi dan bimtek masyarakat, dalam hal pelaporan masyarakat untuk urusan pelayanan pemerintahan dan layanan lainnya	1	1	1	1							DOKUMEN LAPORAN
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Publikasi dan layanan informasi publik untuk masyarakat, berupa baliho, iklan, banner dan lain sebagainya (iklan layanan masyarakat)	5	5	5	5							DOKUMEN LAPORAN
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan media komunikasi publik	Operasionalisasi pelayanan Radio Pemerintah Daerah	1	1	1	1							DOKUMEN LAPORAN
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPABILITAS DAYA BAIK KEOLAHRAGAAN											DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	
2.19.03.2.08	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi												
2.19.03.2.08.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pelaksanaan festival olahraga tradisional	22	22	25	25							ORANG

Domain : Ketenagakerjaan Layak 1. Persentase Pemuda NEET 2. Persentase Pemuda pekerja tidak penuh 3. Rasio Kewirausahaan		Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100												
Bentuk Koordinasi: Ketenagakerjaan layak bagi pemuda dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi saat pemuda dapat produktif dalam mengerjakan pekerjaan yang digelutinya dan mereka didukung dengan akses yang memadai terhadap pekerjaan layak, misalnya upah, jam kerja, perlindungan sosial, kontrak, dan status pekerjaan yang selavak-lavaknya														
Koordinator Strategi Lintas Sektor	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Definisi/ Aktifitas	Baseline	2024	2025	Target				2029	Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)	
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi												
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Industri	Pelatihan kepada masyarakat, untuk peningkatan skill dalam bekerja	240	240	256	262						ORANG	
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi												
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA											DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota												
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja												
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Fasilitas calon tenaga kerja, untuk keperluan keberangkatan kerja diluar kota atau luar negeri	50	50	50	50						ORANG	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja												
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Pemberian layanan dan sosialisasi kepada masyarakat Disabilitas terkait pekerjaan dan ketenagakerjaan	1	1	1	1						ORANG	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kemampuan Kerja	Monitoring kelompok yg mendapat bantuan	1	1	1	1						ORANG	
	2.07.04.2.03	Perluasan Informasi Pasar Kerja												

3.26.02.2.04.0009	Penyediaan layanan konsultasi pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di tingkat kab/kota	sosialisasi Layanan Fasilitas konsultasi pendaftaran perizinan berusaha sektor pariwisata di tingkat Kab/Kota	1	1	1	1				DOKUMEN	
3.26.02.2.04.0011	Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di kab/kota	Sosialisasi standar usaha Pariwisata	1	1	1	1				UNIT USAHA	
2.13.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berperak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah										
2.13.04.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat guna										
2.19.02	PROGRAM PENOEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.19.02.2.01	Peningkatan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirusaha Muda										
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirusaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Sosialisasi dan koordinasi terkait program kewirausahaan pemuda	22	22	25	25				ORANG	
2.19.02.2.02	Peningkatan dan Penguatan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirianekonomi tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan kelompok pemuda dalam upaya peningkatan kewirausahaan dan kemandirian kelompok pemuda	22	22	25	25				ORANG	
2.17.08	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08.2.01	Pendidikan dan latihan berkoperasi bagi koperasi yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota										
2.17.08.2.01.001	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Memberikan edukasi dan pemahaman kepada anggota/pengurus/pengawas koperasi di Kabupaten Muara Enim terkait pengelolaan koperasi	80	80	150	150				ORANG	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang kerjanya dalam daerah kab/kota										
2.17.06.2.01.002	Penumbuh kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya										
2.17.06.2.01.003	pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dna kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam penguatan ekonomi	Memberikan edukasi dan pendampingan bagi kelompok masyarakat seperti anak sekolah dan kelompok pemuda di masyarakat	360	360	360	360				ORANG	
2.17.06.2.01.005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Melakukan pendampingan dan pembinaan koperasi, fasilitas penghargaan koperasi berprestasi, dan pendampingan pendirian koperasi	100	100	100	100				KOPERASI	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui kegiatan pelatihan, kemitraan, perizinan, bantuan kewirausahaan dan										
2.17.07.2.01.002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro										
2.17.07.2.01.003	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Memberikan pendampingan perizinan usaha kepada masyarakat umum di tingkat kabupaten	240	240	300	300				ORANG	
2.17.07.2.01.004	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro										
2.17.07.2.01.005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro										
2.17.07.2.01.007	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil										
2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelatihan dan Edukasi kepada pelaku usaha untuk dapat menayangkan produknya pada E-Katalog LKPP			25	25				PELAKU USAHA	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku UKM di Kabupaten Muara Enim terkait kewirausahaan dan keterampilan teknis olahan sumber daya alam	60	60	60	80				PELAKU USAHA	

3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01	Pengelolaan perikanan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu							
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Pemberian bantuan berupa sarana usaha perikanan tangkap, kepada kelompok pengusaha perikanan	245	245	250	255	UNIT	
3.25.03.2.02	Peningkatan nelayan kecil dalam daerah kabupaten atau kota							
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan atau petani ikan kecil	30	30	30	30	ORANG	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02	Pembinaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian peningkatan kapasitas kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	24	24	26	28	KELOMPOK	
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bantuan untuk mendorong pembentukan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	14	14	16	18	KELOMPOK	
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembinaan, Kredit Usaha	Pemberian bantuan pembiayaan kemitraan usaha kepada kelompok usaha perikanan	30	30	30	30	KELOMPOK	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan akses ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Pendidikan dan Pelatihan							
3.25.06	PROGRAM PENGOLOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelaksanaan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko, pada bentuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	30	30	30	30	UNIT USAHA	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko							
3.25.06.2.03	Pembinaan dan pengolahan bahan baku industri perikanan ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota							
3.25.06.2.03.0002	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan peralatan perikanan kepada pelaku usaha dibidang perikanan	30	30	30	30	PELAKU USAHA	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01	Pembinaan dan Peralihan pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka							
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pembinaan Oapoktan/Kelompok Lumbung dan Toko Tani Indonesia	7	7	7	7	GAPOKTAN	
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengiriman delegasi daerah untuk mengikuti lomba inovasi ketahanan pangan tingkat nasional	2	2	2	2	KALI	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.30.02.2.01	Pembinaan Izin Perdagangan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik							
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Peralihan Sarana Distribusi Perdagangan							
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana dan Prasarana Perdagangan (Pasar)	14,06%	14,06%	15,63%	17,19%	PRESENTAS E	

3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	pedagang/ pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pemasaran produk	60	60	60	60	ORANG	
3.31.03	PROGRAM PENGOENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan							
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Industri Kecil dan Menengah yang memperoleh pembinaan/pelatihan dan peralatan produksi	6,50%	6,80%	6,90%	7%	PERSENTASE	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kabupaten/Kota							
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui BIIINas	Industri Kecil dan Menengah yang memperoleh promosi/ mengikuti kegiatan pameran	6,50%	6,80%	6,90%	7%	PERSENTASE	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota							
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitas keterlibatan antar OPD untuk pameran tingkat Provinsi dan Nasional "UMKM meunggahat"	1	1	1	2	DOKUMEN LAPORAN	
2.18.04	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
2.18.04.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota							
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pendaftaran izin usaha /NIB Kepada pelaku usaha di Kecamatan-Kecamatan	1.350	1.350	1.430	1.445	PELAKU USAHA	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Pelatihan kepada masyarakat, untuk peningkatan skill dalam bekerja	240	240	256	262	ORANG	
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi							
1.02.04	PROGRAM PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BATU PINTU
1.02.04.2.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin makanan minuman tertentu yang dapat							
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga							
1.02.04.2.04	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/retoran dan depot air minum (DAM)							
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/retoran dan depot air minum (DAM)							
1.02.04.2.05	Penerbitan stiker pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan							
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan							

2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi pengembangan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	22	25	25	25				ORANG	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pelatihan pemuda di bidang kemandirian ekonomi	22	25	25	25				ORANG	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila	Pembentukan atau pengangkatan purna paskibraka sebagai Duta Pancasila	56	56	75	75				ORANG	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BERTA BUDAYA POLITIK										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Melakukan Kegiatan Sosialisasi terkait Pemilihan Kepala daerah yang diikuti juga oleh mahasiswa dan pelajar	100	100	100	100				ORANG	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Merekrut organisasi pemuda kedalam Forum Kerukunan umat beragama dan melaksanakan sosialisasi	100	100	100	100				ORANG	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pemantapan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa										
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa										
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
2.13.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya										
2.13.04.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat										
2.13.04.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perdamaian Masyarakat Desa										
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kimia dalam Daerah Kabupaten/Kota										
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga										
1.05.04.2.04	Pembinaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	500	500	500	500				ORANG	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10	10	10	10				DESA	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAKAN										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah										
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Sosialisasi penyuluhan sampah, pemilahan sampah dan edukasi sampah kepada masyarakat	150	150	150	150				ORANG	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan BPPLH Kabupaten/Kota	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPPLH	20	20	20	20				DOKUMEN	
2.11.02.2.01.0006	Pembuatan RPPLH Kabupaten/Kota	Manajemen dokumen kebijakan BPPLH	10	10	10	10				DOKUMEN	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan untuk Sekolah Adiwiyata dan lomba hari lingkungan hidup se-dunia	1	1	1	1				DOKUMEN LAPORAN	
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.09.2.01	Penelitian dan Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	2.11.09.2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli dan aktif dalam urusan lingkungan hidup	1	1	1	1				ORANO/EN TITAS	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota										
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										
	2.14.03.2.02	Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Penyuluh KB Tingkat Lapangan										
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	KB (PKB/PLKB)									
	2.14.03.2.02.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UJPPKA)										
	2.14.03.2.02.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UJPPKA)										
B. KAJIAN DAN PENELITIAN BERSAMA TENTANG PERSOALAN PEMUDA	B. Kajian DAN PENELITIAN BERSAMA TENTANG PERSOALAN PEMUDA	Bentuk Koordinasi a. Penguatan pemberdayaan Pemuda melalui Penyelenggaraan Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan terkait persoalan Pemuda; b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, <i>Human Immunodeficiency virus/acquired Immunodeficiency syndrome</i> , pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.	Jumlah kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda yang terlaksana dimanfaatkan (kajian)									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan										
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Pelaksanaan Pendampingan BUMDes di Kabupaten Muara Enim	1	1	1	1				LAPORAN	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kegiatan Pengembangan sistem Aplikasi Percepatan penurunan Stunting di Kab. Muara Enim	1	1	1	1				LAPORAN	
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Peraturan	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Kab. Muara Enim	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pipet dari Purun di Kabupaten Muara Enim	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan kearifan lokal dalam budaya lisan	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kegiatan Kajian Model Desa Wisata berbasis Masyarakat - <i>Community Based Tourism</i> di Kabupaten Muara Enim	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kegiatan monitoring dan Evaluasi, dan Pendampingan pencegahan penurunan Stunting di Kabupaten Muara Enim	1	1	1	1				DOKUMEN	

Domain Pendidikan dan Pelatihan 1. Persentase Pemuda mendapatkan Pelatihan bersertifikat; 2. Persentase Pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi; dan 3. Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK.		Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat										
Bentuk Koordinasi: Pendidikan formal dan nonformal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan penguasaan karakter dan kompetensi individu pemuda, termasuk bagi pemuda yang berada di luar sekolah. Penguasaan karakter dan kompetensi individu ini diperlukan sebagai modal dasar bagi pemuda agar memiliki ketahanan dari perilaku berisiko, untuk berpartisipasi di pasar kerja dan berperan aktif dalam pembangunan. Disamping itu, pendidikan dan pelatihan juga diharapkan dapat menghasilkan kemampuan pemuda untuk dapat membina keluarga dan generasi penerus (terutama yang sudah berkeluarga) secara berkualitas. Karenanya, di dalam domain pendidikan dan pelatihan, pemuda didorong untuk mengenyam pendidikan formal dan mengikuti pelatihan (pendidikan nonformal).		Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir										
Koordinator Strategis Lintas Sektor " (KABUPATEN / KOTA) "	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DEFINISI/ AKTIVITAS	Baseline	Target						Satuan Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama										
sekolah dasar	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	226	226	230	235				ORANG	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	34618	34618	34623	34628				PAKET	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan										
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	41	41	45	50				ORANG	
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	1	1				DOKUMEN	
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal										
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	150	150	150	150				DOKUMEN	
	1.05.02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana)										
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota										
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat										
	02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan dan pelaksanaan Jemput bola Dokumen Kependudukan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen kependudukan yang disebabkan oleh Disabilitas, Sakit, bencana alam, dsb)	2	2	2	2				DOKUMEN	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Kependudukan	2	2	2	2				DOKUMEN	
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penerbitan Dokumen Sipil										

8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Merekrut organisasi pemuda kedalam Forum Kerukunan umat beragama dan melaksanakan sosialisasi	100	100	100	100						ORANG	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota												
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat												
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten, Kota												
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup												
2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat												
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSEMBAHAN	
2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah Kabupaten/Kota												
2.16.02.2.01.0002	Monitoring opini dan aspirasi publik	Sosialisasi dan bimtek pada masyarakat, dalam hal pelaporan masyarakat untuk urusan pelayanan pemerintahan dan layanan lainnya	1	1	1	1							DOKUMEN LAPORAN
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Publikasi dan layanan informasi publik untuk masyarakat, berupa baliho, iklan, banner dan lain sebagainya (iklan layanan masyarakat)	5	5	5	5							DOKUMEN LAPORAN
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan media komunikasi publik	Operasionalisasi pelayanan Radio Pemerintah Daerah	1	1	1	1							DOKUMEN LAPORAN
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi												
2.19.03.2.03.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pelaksanaan festival olahraga tradisional	22	22	25	25							ORANG

Domain : Ketenagakerjaan Layak 1. Persentase Pemuda NEET 2. Persentase Pemuda pekerja tidak penuh 3. Rasio Kewirausahaan		Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100											
Bentuk Koordinasi: Ketenagakerjaan layak bagi pemuda dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi saat pemuda dapat produktif dalam mengerjakan pekerjaan yang digelutinya dan mereka didukung dengan akses yang memadai terhadap pekerjaan layak, misalnya upah, jam kerja, perlindungan sosial, kontrak, dan status pekerjaan yang selengkap-lengkapya													
Koordinator Strategis Lintas Sektor	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Definisi/ Aktifitas	Baseline	Target						Status Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029			
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan kepada masyarakat, untuk peningkatan skill dalam bekerja	240	240	256	262						ORANG
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi											
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota											
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja											
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Fasilitasi calon tenaga kerja, untuk keperluan keberangkatan kerja diluar kota atau luar negeri	50	50	50	50						ORANG
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja											
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Pemberian layanan dan sosialisasi kepada masyarakat Disabilitas terkait pekerjaan	1	1	1	1						ORANG
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Membantu masyarakat yang mendapat bantuan	1	1	1	1						ORANG
	2.07.04.2.03	Pemberian Informasi Pasar Kerja											

3.26.02.2.04.0009	Penyediaan layanan konsultasi pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di tingkat kab/kota	sosialisasi Layanan Fasilitas konsultasi pendaftaran perizinan berusaha sektor pariwisata di tingkat Kab/Kota	1	1	1	1				DOKUMEN	
3.26.02.2.04.0011	Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di kab/kota	Sosialisasi standar usaha Pariwisata	1	1	1	1				UNIT USAHA	
2.13.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah										
2.13.04.2.01.0005	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										
2.13.04.2.01.0006	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										DINAS KEPEMUDAAN DAN OLIMPISIA
2.19.02.2.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda										
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirusaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Sosialisasi dan koordinasi terkait program kewirausahaan pemuda	22	22	25	25				ORANO	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirianekonomi	Pemberdayaan kelompok pemuda dalam upaya peningkatan kewirausahaan dan kemandirian kelompok pemuda	22	22	25	25				ORANO	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05.2.01	Pendidikan dan latihan bagi koperasi yang wilayahnya ada dalam daerah kabupaten/kota										
2.17.05.2.01.001	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Memberikan edukasi dan pemahaman kepada anggota/pengurus/pengawas koperasi di Kabupaten Muara Enim terkait pengelolaan koperasi	80	80	150	150				ORANG	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayahnya ada dalam daerah kab/kota										
2.17.06.2.01.002	Penumbuh kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya										
2.17.06.2.01.003	pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dna kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi	Memberikan edukasi dan pendampingan bagi kelompok masyarakat seperti anak sekolah dan kelompok pemuda di masyarakat	360	360	360	360				ORANG	
2.17.06.2.01.005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Melakukan pendampingan dan pembinaan koperasi, fasilitas penghargaan koperasi berprestasi, dan pendampingan pendirian koperasi	100	100	100	100				KOPERASI	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha mikro yang dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan										
2.17.07.2.01.002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro										
2.17.07.2.01.003	Fasilitas kemudahan perizinan usaha mikro	Memberikan pendampingan perizinan usaha kepada masyarakat umum di tingkat kecamatan	240	240	300	300				ORANG	
2.17.07.2.01.004	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro										
2.17.07.2.01.005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro										
2.17.07.2.01.007	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil										
2.17.07.2.01.0012	Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelatihan dan Edukasi kepada pelaku usaha untuk dapat menayangkan produknya pada B-Katalog KPP			25	25				PELAKU USAHA	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku UKM di Kabupaten Muara Enim terkait kewirausahaan dan keterampilan teknis olahan sumber daya alam	60	60	60	80				PELAKU USAHA	

	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP											DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01	Pengelolaan perikanan jika diwilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu											
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Pemberian bantuan berupa sarana usaha perikanan tangkap, kepada kelompok pengusaha perikanan	245	245	250	255					UNIT	
	3.25.03.2.02	Pengembangan nelayan kecil dalam daerah kabupaten atau kota											
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan atau petani ikan kecil	30	30	30	30					ORANG	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN SUDIDAYA											DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02	Pembinaan Pembudi Daya Ikan Kecil											
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian peningkatan kapasitas kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	24	24	26	28					KELOMPOK	
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bantuan untuk mendorong pembentukan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	14	14	16	18					KELOMPOK	
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pemberian bantuan pembiayaan kemitraan usaha kepada kelompok usaha perikanan	30	30	30	30					KELOMPOK	
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta											
	3.25.06	PROGRAM PENGOLOHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN											DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan hasil Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil											
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelaksanaan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko, pada bentuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	30	30	30	30					UNIT USAHA	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko											
	3.25.06.2.03	Pemberian dan penyelenggaraan bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota											
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan peralatan perikanan kepada pelaku usaha dibidang perikanan	30	30	30	30					PELAKU USAHA	
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pangan Pokok atau Pangan Lainya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka											
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Pembinaan Gapoktan/Kelompok Lumbung dan Toko Tani Indonesia	7	7	7	7					GAPOKTAN	
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal											
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengiriman delegasi daerah untuk mengikuti lomba inovasi ketahanan pangan ditingkat nasional	2	2	2	2					KALI	
	3.30.02	PROGRAM PERISINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
	3.30.02.2.01	Pembinaan Izin Usaha dan Pasar Rakyat Pusat, Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan											
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitas pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik											
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
	3.30.03.2.01	Pengembangan dan Penyelenggaraan Sarana Distribusi Perdagangan											
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana dan Prasarana Perdagangan (Pasar)	14,06%	14,06%	15,63%	17,19%					PRESENTAS E	

3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	pedagang/ pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pemasaran produk	60	60	60	60	ORANG	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan							
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.02.2.01	Pembinaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Industri Kecil dan Menengah yang memperoleh pembinaan/pelatihan dan peralatan produksi	6,50%	6,80%	6,90%	7%	PERSENTASE	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.04.2.01	Pembinaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Kabupaten/Kota							
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINNAS	Industri Kecil dan Menengah yang memperoleh promosi/ mengikuti kegiatan pameran	6,50%	6,80%	6,90%	7%	PERSENTASE	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01	Pembinaan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota							
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Fasilitas keterlibatan antar OPD untuk pameran tingkat Provinsi dan Nasional "UMKM unggulan"	1	1	1	2	DOKUMEN LAPORAN	
2.18.04	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01	Pembinaan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota							
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pendaftaran izin usaha / NIB Kepada pelaku usaha di Kecamatan- Kecamatan	1.350	1.350	1.430	1.445	PELAKU USAHA	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaater Berusaha	Pelatihan kepada masyarakat, untuk peningkatan skill dalam bekerja	240	240	256	262	ORANG	
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi							
1.02.04	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.04.2.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi							
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga							
1.02.04.2.04	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/retoran dan depot air minum (DAM)							
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/retoran dan depot air minum (DAM)							
1.02.04.2.05	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan							
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan							

1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga																		
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan																		
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3.27.03.2.01	Pengembangan prasarana pertanian																		
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan /LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan /LCP2B di kabupaten/kota	Pemberian fasilitas kepada kelompok tani untuk peningkatan produksi pertanian	45	45	45	45													KELOMPOK
3.27.03.2.02	Pembangunan prasarana pertanian																		
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Pembangunan jalan ruas lokal pertanian	15.861,40	15.861,40	16.000	16.000													METER
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan irigasi pertanian yang diserahkan kepada Kelompok Tani	17	17	17	17													PAKET
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN																DINAS PERKULIAHAN		
3.27.03.2.02	Pembangunan prasarana pertanian																		
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Pembukaan jalan produksi untuk akses mengangkut hasil panen komoditi pertanian	30	30	30	30													KILO METER
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																DINAS PERKULIAHAN		
3.27.07.2.01	Pengembangan Penyuluhan Pertanian																		
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani (Pertanian Kebun)	4	4	4	4													KELOMPOK
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN																DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN		
3.27.07.2.01	Pengembangan Penyuluhan Pertanian																		
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani	13	13	13	13													KELOMPOK

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan 1. Persentase Pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat; 2. Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi; dan 3. Persentase Pemuda yang menduduki posisi manajerial.		Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya									
		Proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya									
Bentuk Koordinasi Partisipasi dan kepemimpinan pemuda mencerminkan adanya keterlibatan pemuda secara aktif dalam aktivitas kewargaan, sosial-kemasyarakatan, dan politik, serta menunjukkan potensi pemuda sebagai aset penerus bangsa menjadi pemimpin atau seorang pengambil keputusan dalam berbagai aspek kehidupan.		Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja									
Koordinator Strategi Lintas Sektor	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Definisi/Aktivitas	Baseline	Target					Jumlah Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Penghargaan kepada pemuda berprestasi dan penggerak kepemudaan	273	273	275	310				ORANO
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Pelaksanaan kegiatan Pemimpin muda, untuk menyeleksi dan mendukung inovasi pemuda yang memelopori pembangunan	22	22	25	25				ORANO
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Pelaksanaan kegiatan Pemuda Pelopor, untuk menyeleksi dan mendukung inovasi pemuda yang memelopori pembangunan	22	22	25	25				ORANO
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Sosialisasi pengembangan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	22	25	25	25			ORANG
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pelatihan pemuda di bidang kemandirian ekonomi	22	25	25	25			ORANG
8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila dan Karakter Kebangsaan								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila	Pembentukan atau pengangkatan purna paskibraka sebagai Duta Pancasila	56	56	75	75			ORANG
8.01.03	PROGRAM Peningkatan PERAN PARTAI POLITIK dan LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK dan PENGEMBANGAN ETIKA serta BUDAYA POLITIK								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik								
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Melakukan Kegiatan Sosialisasi terkait Pemilihan Kepala daerah yang diikuti juga oleh mahasiswa dan pelajar	100	100	100	100			ORANG
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, dan BUDAYA								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Merekrut organisasi pemuda kedalam Forum Kerukunan umat beragama dan melaksanakan sosialisasi	100	100	100	100			ORANG
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								
2.13.04.2.01.0006	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa								
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa								
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa								
2.13.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT								DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Penyelenggaraan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya								
2.13.04.2.01.0007	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								
2.13.04.2.01.0008	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perdamaian Masyarakat Desa								
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN dan PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemukiman, Pemertanian, dan Pemukiman Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga								
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	500	500	500	500			ORANG
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10	10	10	10			DESA
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah								
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Sosialisasi penyuluhan sampah, pemilahan sampah dan edukasi sampah kepada masyarakat	150	150	150	150			ORANG
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota								
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan BPPLH Kabupaten/Kota	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPPLH	20	20	20	20			DOKUMEN
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Menyusun dokumen kebijakan BPPLH	10	10	10	10			DOKUMEN
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN dan PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP untuk MASYARAKAT								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan untuk Sekolah Adiwiyata dan lomba lingkungan hidup se-dunia	1	1	1	1				DOKUMEN LAPORAN	
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang peduli dan aktif dalam urusan lingkungan hidup	1	1	1	1				ORANG/EN TITAS	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA										BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana										
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota										
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penuh KB/Petugas Lapangan	KB (PKB/PLKB)									
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
	2.14.03.2.02.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IIPPKA))										
	2.14.03.2.02.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (IIPPKA))										
B. KAJIAN DAN PENELITIAN BERSAMA TENTANG PERSOALAN PEMUDA	B. Kajian DAN PENELITIAN BERSAMA TENTANG PERSOALAN PEMUDA	Bentuk Koordinasi a. Penguatan pemberdayaan Pemuda melalui Penyelenggaraan Penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan terkait persoalan Pemuda; b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, Human Immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.	Jumlah kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda yang terlaksana dimanfaatkan (kajian)									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Perencanaan, Perencanaan dan Analisis Peraturan										
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Pelaksanaan Pendampingan BUMDes di Kabupaten Muara Enim	1	1	1	1				LAPORAN	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kegiatan Pengembangan sistem Aplikasi Percepatan penurunan Stunting di Kab. Muara Enim	1	1	1	1				LAPORAN	
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Penilaian Peraturan	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemanfaatan IPTEK di Kab. Muara Enim	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kegiatan Pelatihan Pembuatan Pipet dari Purun di Kabupaten Muara Enim	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kegiatan Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan kearifan lokal dalam budaya lisan	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kegiatan Kajian Model Desa Wisata berbasis Masyarakat - <i>Community Based Tourism</i>	1	1	1	1				DOKUMEN	
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kegiatan Pengkajian dan Evaluasi, dan Pendampingan pencegahan penurunan Stunting di Kabupaten Muara Enim	1	1	1	1				DOKUMEN	

Domain Pendidikan dan Pelatihan 1. Persentase Pemuda mendapatkan Pelatihan bersertifikat; 2. Persentase Pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi; dan 3. Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK.		Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat									
Bentuk Koordinasi: Pendidikan formal dan nonformal merupakan instrumen penting untuk meningkatkan penguasaan karakter dan kompetensi individu pemuda, termasuk bagi pemuda yang berada di luar sekolah. Penguasaan karakter dan kompetensi individu ini diperlukan sebagai modal dasar bagi pemuda agar memiliki ketahanan dari perilaku berisiko, untuk berpartisipasi di pasar kerja dan berperan aktif dalam pembangunan. Disamping itu, pendidikan dan pelatihan juga diharapkan dapat menghasilkan kemampuan pemuda untuk dapat membina keluarga dan generasi penerus (terutama yang sudah berkeluarga) secara berkualitas. Karenanya, di dalam domain pendidikan dan pelatihan, pemuda didorong untuk mengenyam pendidikan formal dan mengikuti pelatihan (pendidikan nonformal).		Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir									
Koordinator Strategis Lintas Sektor	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DEFINISI/ AKTIVITAS	Baseline	Target					Satuan Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)
					2024	2025	2026	2027	2028		
" (KABUPATEN / KOTA) "	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama									
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	226	226	230	235			ORANG	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Peserta Didik	Jumlah Perolehan Peserta Didik yang Tersedia	34618	34618	34623	34628			PAKET	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	41	41	45	50			ORANG	
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	1	1	1			DOKUMEN	
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	150	150	150	150			DOKUMEN	
1.05.02	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota										
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana)										
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota										
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT									DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat / komunitas/ kelompok masyarakat										
02.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan dan pelaksanaan Jemput bola Dokumen Kependudukan penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen kependudukan yang disebabkan oleh Disabilitas, Sakit, bencana alam, dsb)	2	2	2	2			DOKUMEN		
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Kependudukan	2	2	2	2			DOKUMEN		
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										

8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Merekruit organisasi pemuda kedalam Forum Kerukunan umat beragama dan melaksanakan sosialisasi	100	100	100	100							ORANG	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota													
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup													
2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat													
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK											DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN BERSAMA-SAMA		
2.16.02.2.01	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintahan Kabupaten/Kota													
2.16.02.2.01.0002	Monitoring opini dan aspirasi publik	Sosialisasi dan bimtek pada masyarakat, dalam hal pelaporan masyarakat untuk urusan pelayanan pemerintahan dan layanan lainnya	1	1	1	1							DOKUMEN LAPORAN	
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Publikasi dan layanan informasi publik untuk masyarakat, berupa baliho, iklan, banner dan lain sebagainya (iklan layanan masyarakat)	5	5	5	5							DOKUMEN LAPORAN	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan media komunikasi publik	Operasionalisasi pelayanan Radio Pemerintah Daerah	1	1	1	1							DOKUMEN LAPORAN	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN											DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi													
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pelaksanaan festival olahraga tradisional	22	22	25	25							ORANG	

Domain : Ketenagakerjaan Layak		Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda											
1. Persentase Pemuda NEET		Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja											
2. Persentase Pemuda pekerja tidak penuh		Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100											
3. Rasio Kewirausahaan													
Bentuk Koordinasi:		Ketenagakerjaan layak bagi pemuda dapat diinterpretasikan sebagai suatu kondisi saat pemuda dapat produktif dalam mengerjakan pekerjaan yang digelutinya dan mereka didukung dengan akses yang memadai terhadap pekerjaan layak, misalnya upah, jam kerja, perlindungan sosial, kontrak, dan status pekerjaan yang selavak-lavaknya.											
Koordinator Strategis Lintas Sektor	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Definisi/ Aktifitas	Baseline	Target					Status Output	Perangkat Daerah Pelaksana (OPD)		
					2024	2025	2026	2027	2028			2029	
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSFORMASI	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klauster	Pelatihan kepada masyarakat, untuk peningkatan skill dalam bekerja	240	240	256	262					ORANG	
	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi											
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSFORMASI	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota											
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja											
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Fasilitasi calon tenaga kerja, untuk keperluan keberangkatan kerja diluar kota atau luar negeri	50	50	50	50					ORANG	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja											
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Pemberian layanan dan sosialisais kepada masyarakat Disabilitas terkait	1	1	1	1					ORANG	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Monitoring dan evaluasi bantuan		1	1	1					ORANG	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											

3.26.02.2.04.0009	Penyediaan layanan konsultasi pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata di tingkat kab/kota	sosialisasi Layanan Fasilitas konsultasi pendaftaran perizinan berusaha sektor pariwisata di tingkat Kab/Kota	1	1	1	1				DOKUMEN	
3.26.02.2.04.0011	Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di kab/kota	Sosialisasi standar usaha Pariwisata	1	1	1	1				UNIT USAHA	
2.13.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Perencanaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah										
2.13.04.2.01.0005	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa										
2.13.04.2.01.0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna										
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN										DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01	Peningkatan Pemahaman dan Kemampuan Pemuda dan Perempuan Terhadap Pemuda Pelopor /Kota Wirusaha Muda										
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirusaha Pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Sosialisasi dan koordinasi terkait program kewirausahaan pemuda	22	22	25	25				ORANG	
2.19.02.2.02	Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirianekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan kelompok pemuda dalam upaya peningkatan kewirausahaan dan kemandirian kelompok pemuda	22	22	25	25				ORANG	
2.17.06	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01	Peningkatan dan latihan perbasan koperasi yang wilayah dalam daerah kabupaten/kota										
2.17.06.2.01.001	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Memberikan edukasi dan pemahaman kepada anggota/pengurus/pengawas koperasi di Kabupaten Muara Enim terkait pengelolaan koperasi	80	80	150	150				ORANG	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06.2.01	Peningkatan dan perlindungan koperasi yang wilayah dalam daerah kab/kota										
2.17.06.2.01.002	Penumbuh kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya										
2.17.06.2.01.003	pembinaan dan pendampingan bagi keluarga dna kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi	Memberikan edukasi dan pendampingan bagi kelompok masyarakat seperti anak sekolah dan kelompok pemuda di masyarakat	360	360	360	360				ORANG	
2.17.06.2.01.005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Melakukan pendampingan dan pembinaan koperasi, fasilitasi penghargaan koperasi berprestasi, dan pendampingan pendirian koperasi	100	100	100	100				KOPERASI	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM										DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui kemitraan perizinan penguatan kelembagaan dan										
2.17.07.2.01.002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro										
2.17.07.2.01.003	Facilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Memberikan pendampingan perizinan usaha kepada masyarakat umum di tingkat kabupaten	240	240	300	300				ORANG	
2.17.07.2.01.004	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro										
2.17.07.2.01.005	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro										
2.17.07.2.01.007	Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil										
2.17.07.2.01.0012	Facilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelatihan dan Edukasi kepada pelaku usaha untuk dapat menayangkan produknya pada E-Katalog LKPP	-	-	25	25				PELAKU USAHA	
2.17.07.2.01.0015	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Memberikan edukasi dan pemahaman kepada pelaku UKM di Kabupaten Muara Enim terkait kewirausahaan dan keterampilan teknis olahan sumber daya alam	60	60	60	80				PELAKU USAHA	

3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							DINAS PERIKANAN
3.25.03.2.01	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan perairan air lainnya yang dapat disebabkan dalam satu							
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap	Pemberian bantuan berupa sarana usaha perikanan tangkap, kepada kelompok pembudidaya perikanan	245	245	250	255	UNIT	
3.25.03.2.02	Pembudidayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten atau kota							
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan atau petani ikan kecil	30	30	30	30	ORANG	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							DINAS PERIKANAN
3.25.04.2.02	Pembudidayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemberian peningkatan kapasitas kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	24	24	26	28	KELOMPOK	
3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bantuan untuk mendorong pembentukan kelembagaan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil	14	14	16	18	KELOMPOK	
3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Perbaikan dan Kemitraan Usaha	Pemberian bantuan pembiayaan kemitraan usaha kepada kelompok usaha perikanan	30	30	30	30	KELOMPOK	
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan							
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							DINAS PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Pelaksanaan pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko, pada bentuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	30	30	30	30	UNIT USAHA	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko							
3.25.06.2.03	Pemberian dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota							
3.25.06.2.03.0002	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah Kabupaten/Kota	Pemberian bantuan peralatan perikanan kepada pelaku usaha dibidang perikanan	30	30	30	30	PELAKU USAHA	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia							
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						GAPOKTAN	
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Pengiriman delegasi daerah untuk mengikuti lomba inovasi ketahanan pangan tingkat nasional	2	2	2	2	KALI	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik							
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.30.03.2.01	Pembinaan dan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana dan Prasarana Perdagangan (Pasar)	14,06%	14,06%	15,63%	17,19%	PRESENTASE	

3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	pedagang/ pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pemasaran produk	60	60	60	60	ORANG	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan							
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.02.2.01	Penelitian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Industri Kecil dan Menengah yang memperoleh pembinaan/pelatihan dan peralatan produksi	6,50%	6,80%	6,90%	7%	PERSENTASE	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IUKI Kabupaten/Kota							
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SINas	Industri Kecil dan Menengah yang memperoleh promosi/ mengikuti kegiatan pameran	6,50%	6,80%	6,90%	7%	PERSENTASE	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01	Peningkatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten / Kota							
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas keterlibatan antar OPD untuk pameran tingkat Provinsi dan Nasional "UMKM Berprestasi"	1	1	1	2	DOKUMEN LAPORAN	
2.18.04	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01	Peningkatan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Keunggulan Daerah Kabupaten / Kota							
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Fasilitas Pendaftaran izin usaha /NIB Kepada pelaku usaha di Kecamatan-Kecamatan	1.350	1.350	1.430	1.445	PELAKU USAHA	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSFORMASI
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Komunitas	Pelatihan kepada masyarakat, untuk peningkatan skill dalam bekerja	240	240	256	262	ORANG	
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi							
1.02.04	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PEMERIKSAAN							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.04.2.03	Penerbitan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi							
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri rumah tangga							
1.02.04.2.04	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/retoran dan depot air minum (DAM)							
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/retoran dan depot air minum (DAM)							
1.02.04.2.05	Penerbitan stiker sertifikasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan							
1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut stiker sertifikasi pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan							

2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi pengembangan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	22	25	25	25				ORANG	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan pelatihan pemuda di bidang kemandirian ekonomi	22	25	25	25				ORANG	
8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila dan KARAKTER Kebangsaan										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purna paskibraka Duta Pancasila	Pembentukan atau pengangkatan purna paskibraka sebagai Duta Pancasila	56	56	75	75				ORANG	
8.01.03	PROGRAM Peningkatan PERAN Partai Politik dan LEMBAGA Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan ETIKA serta BUDAYA Politik										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Melakukan Kegiatan Sosialisasi terkait Pemilihan Kepala daerah yang diikuti juga oleh mahasiswa dan pelajar	100	100	100	100				ORANG	
8.01.05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan KETAHANAN EKONOMI, Sosial, dan BUDAYA										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Merekrut organisasi pemuda kedalam Forum Kerukunan umat beragama dan melaksanakan sosialisasi	100	100	100	100				ORANG	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										
2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintahan Muayyarah Desa										
2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Desa										
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa										
2.13.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT dan MASYARAKAT HUKUM ADAT										DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Merupakan Pelakunya										
2.13.04.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat										
2.13.04.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Berkeadilan Masyarakat Desa										
1.05.04	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, PENYELAMATAN Kebakaran dan PENYELAMATAN NON Kebakaran										DINAS PEMADAM Kebakaran dan PENYELAMATAN
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota										
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga										
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran										
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	500	500	500	500				ORANG	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan kebakaran pada lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	10	10	10	10				DESA	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah										
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Sosialisasi penyuluhan sampah, pemilahan sampah dan edukasi sampah kepada masyarakat	150	150	150	150				ORANG	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pemertahanan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota										
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan BPPLH Kabupaten/Kota	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPPLH	20	20	20	20				DOKUMEN	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Menyusun dokumen kebijakan RPPLH	10	10	10	10				DOKUMEN	
2.11.08	PROGRAM Peningkatan Pendidikan, PELATIHAN dan PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP untuk MASYARAKAT										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										

2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per tahun	Pemberian bantuan kepada KWT "Kelompok Wanita Tani" dalam hal fasilitas Pemanfaatan Pekarangan, untuk kemandirian pangan. Dengan target skor pola pangan harian	87	87	90	92					SCORE	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan lomba P2SA yang diikuti oleh peserta khususnya Ibu-ibu PKK, dari tingkat desa dan kecamatan	3	3	3	3					DOKUMEN LAPORAN	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										DINAS PENGOEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengetahuan Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal											
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK											
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Peningkatan Efektifitas Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah											
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB											
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB											
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										DINAS PENGOEDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjut usiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)											
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas											

Program/Kegiatan Tambahan
Program/Kegiatan Sudah Sesuai Template
Program/Kegiatan Tidak ada

BUPATI MUARA ENIM,

dto.

EDISON